

REALISASI KONSTRUKSI LEBIH TARGET

Juni 2015, Konstruksi Tol Cikampek-Palimanan Rampung

Oleh Eko Adityo Nugroho

► JAKARTA – PT Lintas Marga Sedaya (LMS) menyatakan proses konstruksi tol Cikampek-Palimanan sepanjang 116 kilometer (km) itu baru terealisasi 2,2%. Perusahaan pemegang konsesi tol itu menargetkan konstruksi tol rampung pada Juni 2015.

Direktur Operasional PT Lintas Marga Sedaya Steve Ginting mengungkapkan, pembangunan tol tersebut baru dimulai pada awal 2013 seiring diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK) oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada 17 Januari 2013.

"Sejak itu proyek sudah mulai dikonstruksi dan ditargetkan selesai Juni 2015," kata dia saat dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (11/6).

Menurut Steve, proyek tol senilai Rp 12,6 triliun ini akan dikerjakan sekaligus oleh kontraktor PT Karabha Griya Mandiri dan PT Nusa Cipta Raya Jo sebagai kontraktor utama (*main contractor*). Konstruksi dilakukan sekaligus lantaran proses pembebasan tanah sudah mencapai 97,5%.

Pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan terdiri atas enam seksi. Seksi tersebut adalah seksi I Cikop-Kalijati sepanjang 29,12 kilometer (km), seksi II Kalijati-Subang 9,56 km, dan seksi III Subang-Cikedung 31,37 km. Pembangunan dilanjutkan ke seksi IV Cikedung-Kertajati 17,66 km, seksi V Kertajati-Sumberjaya 14,51 km, dan seksi VI Sumberjaya-Palimanan 14,53 km.

Pembiayaan konstruksi jalan tol ini diperkirakan sebesar Rp 12,6 triliun. Adapun sindikasi perbankan yang telah didapat sebesar Rp 7,1 triliun yang berasal dari BCA, Bank DKI, Bank Panin, Bank Jabar Banten, dan ICBC.

Perwakilan manajemen LMS Edwin Sas Gunarto menambahkan, sejak dikerjakan pada Januari 2013 hingga saat ini proses pembangunan tol Cikampek-Palimanan sudah melebihi target. LMS sebagai investor tol Ci-

kampek-Palimanan, sudah mulai memproses pembangunan sejak SPMK dikeluarkan oleh BPJT.

"Hingga awal Juni 2013, proses pembangunan konstruksi tol Cikampek-Palimanan sepanjang 116,7 kilometer sudah melebihi target dengan mencapai 2,2% dari total target. Rahan ini sudah melebihi 0,2% dari target 2%," kata Edwin, Selasa (11/6).

Menurut Edwin, tol Cikampek-Palimanan dapat menstimulasi ekonomi di wilayah Jawa Barat, terutama yang dilewati oleh ruas tol itu. "Tol Cikampek-Palimanan mampu memberikan *multiplier effect* bagi ekonomi, apalagi ruas tol ini merupakan proyek nasional. Kami harapkan dukungan penuh dari semua *stakeholders*," ujar dia.

Pembebasan Lahan

Sementara itu, Ketua Panitia Tim Pembebasan Tanah (TPT) tol Cikampek-Cirebon Eten Rosyadi mengatakan, saat ini proses pembebasan lahan tol sepanjang 116 kilometer tersebut telah mencapai 97,5%. Pembebasan lahan tinggal menyisakan 2,5% di beberapa titik, yakni masih ada 32 warga di Subang yang belum mau melepaskan lahannya.

Warga yang menolak menerima ganti rugi lahan, lanjut dia, diminta untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di jalur hukum. Sebab, sesuai aturan perundang-undangan, bila tetap enggan menerima ganti rugi sesuai kesepakatan dengan warga lainnya, pemerintah akan tetap mengeksekusi lahan dimaksud.

Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah ba-

gi Pembangunan Kepentingan Umum menyatakan, apabila pelepasan objek pengadaan tanah belum selesai dalam waktu paling lama 60 hari, tanahnya telah dilepaskan dan menjadi tanah negara dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

"Pemerintah menganjurkan warga yang tidak mau melepaskan lahannya untuk proyek nasional jalan tol ini agar membawa masalah ke jalur hukum," kata dia, Selasa (11/6).

Eten menambahkan bagi warga yang masih menolak, uang ganti rugi dititipkan di pengadilan (konsinyasi). Saat uang sudah dititipkan di pengadilan, pemerintah akan tetap melanjutkan proyek konstruksi tol.

Eten juga menilai semakin lama warga menahan lahannya, maka nilai ekonomi kerugian warga makin membesar. Alasannya, dalam kasus-kasus konsinyasi uang pengganti lahan yang sering terjadi sebelumnya, pengadilan kerap memutuskan uang pengganti tanah malah jauh lebih kecil ketimbang kesepakatan dengan tim TPT.

"Tidak ada jalan lain, jika warga masih belum mau menerima ganti rugi, silakan ke pengadilan. Namun saya kasihan dengan warga, karena semakin lama warga menahan lahannya, secara ekonomi kerugiannya makin membesar," imbuh dia.

Eten juga menuturkan, langkah-langkah yang diambil oleh TPT, pemerintah, dan LMS sebagai investor dalam proyek Tol Cikampek-Palimanan sudah sesuai dengan aturan main dan prosedur yang ditentukan. Hal itu termasuk sudah ada *legal opinion* dari pengadilan bahwa proses pembebasan lahan di tol Cikampek-Palimanan telah sesuai aturan dan prosedur. Itu berarti walaupun warga terus melakukan gugatan bisa dipastikan, mereka akan kalah di pengadilan. Dan, uang ganti rugi sudah dititipkan di pengadilan.

"Kami memang perlu dan terus memberikan edukasi pada warga, bahwa sudah tidak ada pilihan, proyek nasional ini harus jalan dan kelar. Sebab, manfaat ekonomi setelah jalan tol ini beroperasi sangat besar," papar dia.